

AKTUALISASI PANCASILA

Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan

Pancasila harus selalu dijadikan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup bangsa Indonesia atau lebih dikenal dengan *way of life*. Di dalam menghadapi berbagai persoalan internal dan internasional, Pancasila harus tetap dijadikan pedoman di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penyelenggaraan ketatanegaraan. Kedudukan Pancasila tidak hanya dipandang sebagai dasar negara, tetapi memiliki makna yang lebih jauh seperti ideologi nasional dan sekaligus mengandung makna tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Memperhatikan kuatnya kedudukan Pancasila, maka sebagai anak bangsa memiliki kewajiban untuk mempertahankan, melestarikan, mengaktifkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kekuatan Pancasila adalah sangat identik dengan kekuatan Bangsa Indonesia sehingga kita bersama harus mencegah berbagai rongrongan baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membudayakan nilai-nilai Pancasila secara intensif guna memperkuat jati diri masyarakat yang beridentitas Pancasila. Penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila harus dilakukan melalui berbagai cara kepada masyarakat yang sangat beragam (suku, agama, ras dan antar golongan), sehingga dapat diamalkan dan diimplementasi secara baik dan benar. Nilai-nilai Ketuhanan dan keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan demokrasi serta keadilan sosial agar dapat terpatri di hati masyarakat Indonesia dan tidak mudah tercerai-berai. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan filter terhadap berbagai informasi, pandangan, ideologi yang masuk dari pihak eksternal sehingga dapat menangkai hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Penerbit Lakeisha
Jl. Jatnom Boyolali Km 07
Srikaton, Pucangmiliran, Tulung, Klaten
Tlp/Wa. 08989880852
Fb : Penerbit Lakeisha
Instagram : penerbit.lakeisha
Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com



AKTUALISASI PANCASILA Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan

Penerbit
LAKEISHA



PUSAT STUDI PANCASILA
UNIVERSITAS DWIJENDRA



AKTUALISASI PANCASILA

Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan



I Gusti Ngurah Santika, Gede Sedana, Made Sila,
I Wayan Eka Santika, I Gede Sujana, A.A. Istri Eka Krisna Yanti,
Dewa Made Dwicky Putra Nugraha, I Putu Yoga Purandina,
I Wayan Kotaniartha, Dicky Marsadi, I Putu Yudi Sudarmawan,
Ni Wayan Swarniti, Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, Gede Sutrisna



AKTUALISASI PANCASILA

Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a.penerbitan Ciptaan; b.Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c.Penerjemahan Ciptaan; d.Pengadaptasian, pengarangsemen, atau pentrasformasian Ciptaan; e.Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f.Pertunjukan Ciptaan; g.Pengumuman Ciptaan; h.Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

AKTUALISASI PANCASILA

Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan



Penerbit Lakeisha

2021



AKTUALISASI PANCASILA Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan

Penulis:

I Gusti Ngurah Santika, Gede Sedana, Made Sila,
I Wayan Eka Santika, I Gede Sujana, A.A. Istri Eka Krisna Yanti,
Dewa Made Dwicky Putra Nugraha, I Putu Yoga Purandina,
I Wayan Kotaniartha, Dicky Marsadi, I Putu Yudi Sudarmawan,
Ni Wayan Swarniti, Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja,
Gede Sutrisna

Editor :

I Gusti Ngurah Santika, S.Pd., M.Pd
Ni Wayan Swarniti, S.S., M.Hum
I Putu Edy Purnawijaya, S.Pd., M.Pd
I Made Astra Winaya, SPd., M.Pd

Layout : Yusuf Deni Kristanto

Design Cover : Tim Lakeisha

Cetak II Mei 2021

14,8 cm × 21 cm, 243 Halaman

ISBN: 978-623-6573-44-0

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha

(Anggota IKAPI No.181/JTE/2019)

Redaksi

Jl. Jatinom Boyolali, Srikaton, Rt.003, Rw.001, Pucangmiliran,
Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website : www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Se makin berkembangnya dinamika masyarakat dunia dan memberikan dampak pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, memerlukan adanya penguatan identitas bangsa yang berkesinambungan. Identitas bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila harus semakin dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia di dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila tidak lahir begitu saja, tidak juga berupa hadiah dari negeri manapun, namun Pancasila pada hakekatnya adalah cerminan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, keagamaan/religi yang telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial bagi masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Modal sosial tersebut merupakan nilai-nilai *local wisdom* yang telah dimiliki dan diimplementasikan sebagai suatu pedoman berinteraksi sosial.

Pancasila harus selalu dijadikan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup bangsa Indonesia atau lebih

dikenal dengan *way of life*. Di dalam menghadapi berbagai persoalan internal dan internasional, Pancasila harus tetap dijadikan pedoman di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penyelenggaraan ketatanegaraan. Kedudukan Pancasila tidak hanya dipandang sebagai dasar negara, tetapi memiliki makna yang lebih jauh seperti ideologi nasional dan sekaligus mengandung makna tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Memperhatikan kuatnya kedudukan Pancasila, maka sebagai anak bangsa memiliki kewajiban untuk mempertahankan, melestarikan, mengaktifkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kekuatan Pancasila adalah sangat identik dengan kekuatan Bangsa Indonesia sehingga kita bersama harus mencegah berbagai rongrongan baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membumikan nilai-nilai Pancasila secara intensif guna memperkuat jati diri masyarakat yang beridentitas Pancasila. Penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila harus dilakukan melalui berbagai cara kepada masyarakat yang sangat beragam (suku, agama, ras dan antar golongan), sehingga dapat diamalkan dan diimplementasi secara baik dan benar. Nilai-nilai Ketuhanan dan keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan demokrasi serta keadilan sosial agar dapat terpatri di hati masyarakat Indonesia dan tidak mudah tercerai-berai. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan filter terhadap berbagai informasi, pandangan, ideologi yang masuk dari pihak eksternal sehingga dapat menangkal hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Sebagai insan akademik, membumikan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui penuangan pikiran, ide dan gagasan yang berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, masalah, tantangan dan upaya-upaya untyuk melestarikannya. Pikiran, ide dan gagasan dari para akademisi merupakan bagian dari sikap yang positif sebagai anak bangsa terhadap Pancasila sebagai ideologi negara

dan pedoman hidup serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis buku dalam bentuk *Book Chapter* yang berjudul Pancasila Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan. Besar harapan saya adalah buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi bagi bangsa dan negara untuk bersama-sama menjaga, mempertahankan dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

15 Mei 2021

Rektor Universitas Dwijendra

Dr. Ir. I Gede Sedana, M.Sc., M.MA

PRAKATA

Meskipun sudah lebih dari tujuh dasa warsa ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia (*state s philosophy*) dan pandangan hidup bangsa (*way of life*), pembumian Pancasila selalu saja tampil menjadi isu hangat yang tidak tergantikan dari masa ke masa. Walaupun sebenarnya usaha kearah itu sudah digencarkan dan digalakan mulai dari periode Pemerintahan Presiden Soekarno hingga Pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi sampai kini, pembumian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih jauh dari kata sempurna. Dalam wacana publik semangat pembumian Pancasila begitu ramai diperbincangkan, tetapi sangat sepi teraktualisasi dalam tindakan nyata.

Belum teraktualisasinya Pancasila seharusnya menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi bangsa Indonesia ke depannya. Terdegradasinya aktualisasi Pancasila, sudah semestinya mampu merangsang dan mendorong berbagai pihak untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam upaya membumikan Pancasila. Seluruh komponen bangsa, terutama perguruan tinggi di Indonesia, wajib membumikan Pancasila sesuai dengan kedudukan dan perannya. Melalui Tri Dharma yang diembannya, perguruan tinggi

tidak boleh hanya berdiam diri dan berpangku tangan menyaksikan Pancasila memudar dari ingatan kolektif bangsa Indonesia. Di sini perguruan tinggi dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mengkaji, mentransformasikan, dan mendiseminasikan, serta mengaktualisasikan Pancasila diberbagai sendi kehidupan.

Universitas Dwijendra sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mengambil bagian positif dalam membumikan Pancasila melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Komitmen Universitas Dwijendra terhadap pembumian Pancasila bukan hanya digelorakan dalam wacana akademis, tetapi dibuktikan melalui aktualisasi nyata. Untuk tahun ini saja dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Universitas Dwijendra melalui Pusat Studi Pancasila (PSP) menggagas pembumian Pancasila secara akademis melalui penulisan *Book Chapter* berjudul “Aktualisasi Pancasila Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan”. Penulisan *Book Chapter* ini tidak hanya melibatkan dosen-dosen internal Universitas Dwijendra, tetapi juga dosen dari kampus lain.

Secara garis besarnya *Book Chapter* “Aktulisasi Pancasila Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan” terdiri dari 14 tulisan. Sesuai judulnya, *Book Chapter* ini mengkaji Pancasila dari berbagai perspektif kehidupan. Dari sudut pandang kurikulum pendidikan tinggi, I Gusti Ngurah Santika dalam karyanya berjudul “Analisis Kritis Terhadap PP No. 57 Tahun 2021 Yang Menghapuskan Pancasila Dalam Muatan Kurikulum Pendidikan Tinggi” berupaya mengkritisi alasan Pemerintah yang tidak memasukan Pancasila sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan tinggi; memprediksi implikasi yang mungkin timbul akibat penghapusan Pancasila dalam kurikulum perguruan tinggi; dan langkah yang harus diambil untuk menghakhiri polemik terkait hilangnya Pancasila dalam kurikulum perguruan tinggi.

Dari sudut pandang pertanian, karya Gede Sedana berjudul “Penguatan Modal Sosial Subak Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila” mampu membuktikan, bahwa modal sosial yang masih kuat pada sistem subak memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa yang mudah dimengerti Beliau mendeskripsikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem subak; sistem subak dan modal sosial; nilai-nilai Pancasila pada sistem subak yang terdiri dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, Nilai Persatuan Indonesia, Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hubungan antara nilai Pancasila dengan ajaran Tri Hita Karana dibahas oleh I Made Sila dalam karyanya berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tri Hita Karana”. Bahwa implementasi atau cerminan dari nilai-nilai Pancasila dalam suatu budaya atau ajaran dalam masyarakat Indonesia salah satunya dapat dilihat dalam konsep ajaran Tri Hita Karana. Dengan cara yang pandang berbeda I Waya Eka Santika dalam karyanya berjudul “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Perspektif *Tri Hita Karana* Pada Masa Pandemi Covid-19” melihat bagaimana eksistensi dan kesaktian Pancasila dewasa ini ketika suasana Covid 19 melanda dunia. Pancasila kesaktiannya seolah diuji dalam membimbing bangsa Indonesia agar tetap kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan kehidupan bernegara

I Gede Sujana melalui karyanya berjudul “Urgensi Pancasila Dalam Menghadapi Globalisasi” menjelaskan berbagai keburukan yang muncul akibat globalisasi. Bahwa globalisasi membawa dampak negatif bagi nasionalisme dan hilangnya jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan prestasi sebagai perekat kebangsaan. Tidak adanya prestasi dan kebanggaan yang dimiliki bangsa Indonesia menyebabkan lemahnya rasa kebangsaan atau nasionalisme dari setiap warga negara Indonesia. Di samping

itu, bangsa Indonesia perlu merubah paradigma berpikir diagonalistik.

Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia dikupas A.A. Istri Eka Krisna Yanti melalui karyanya berjudul “Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Di dalamnya dibahas tentang kedudukan Pancasila pada sistem hukum Indonesia dan aktualisasi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menghadirkan teori dari Hans Nawiasky dan Hans Kelsen. Dewa Made Dwickly Putra Nugraha dalam tulisan berjudul “Aksiologi Pancasila dan Tantangan Di Tengah Disrupsi Pembelajaran” membahas secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of Pancasila value*), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial.

Dari sisi ketahanan nasional, I Putu Yoga Purandina melalui karyanya berjudul “Membangun Karakter Generasi Alpha Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Senjata Pamungkas Ketahanan Nasional” memaparkan jika nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai jati diri Bangsa Indonesia ke depannya tentu akan menjadi sebuah senjata yang ampuh, perisai yang kuat untuk melawan rongrongan yang mengancam ketahanan nasional. I Wayan Kontaniartha dalam karyanya berjudul “Mewujudkan Kebebasan Pers Yang Bertanggungjawab Berdasarkan Pancasila” memandang perlu budaya sensor diri dalam media untuk dikembangkan mengingat sistem pers kita adalah sistem pers tanggung jawab sosial yang seharusnya menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah bangsa, yakni Pancasila.

Terkait kebijakan import beras dijelaskan Dicky Marsadi dalam karyanya berjudul “Pentingnya Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Import Beras” menilai, bahwa Pemerintah dalam mengambil kebijakan diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai

Pancasila agar setiap kebijakan atau tindakan yang diambilnya mampu memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi petani padi. Dari segi pendidikan karakter, bahwa berlimpahnya nilai-nilai pendidikan karakter dan juga nilai-nilai Pancasila yang tersirat maupun tersurat dalam warisan leluhur kita, karya sastra yang tersaji dalam cerita rakyat. Hal itu dikemukakan I Putu Yudi Sudarmawan melalui karyanya berjudul “Pendidikan Karakter Dan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Cerita Rakyat Pada Anak Usia Dini”.

Dari sudut pandang pembelajaran, Ni Wayan Swarniti melalui karyanya berjudul “Aplikasi Belajar Quizizz Sebagai Aktualisasi Pancasila Dalam Media Pembelajaran Bagi Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid-19” mampu mendeskripsikan, bahwa penggunaan aplikasi belajar Quizizz adalah bagian dari aktualisasi Pancasila dalam pembelajaran daring. Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja melalui karyanya berjudul “Tata Guna Lahan Dan Penataan Ruang Yang Berkeadilan Spasial” menjelaskan distribusi pembangunan yang tidak merata terjadi salah satunya karena tidak terwujudnya keadilan spasial (keruangan) dalam perencanaan pembangunan, baik itu tata ruang dan tata guna lahan. Tulisan terakhir berjudul “Pemanfaatan *Google Classroom* Untuk Memfasilitasi *Self-Regulated Learning* Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19” karya I Gede Sutrisna.

Terbitnya *Book Chapter* ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih tidak terhingga kepada Dr. Ir. I Gede Sedana Rektor, M.Sc., MMA selaku Rektor Universitas Dwijendra yang senantiasa mendukung ide penulisan *Book Chapter* ini. Tanpa dukungan Beliau, tidak mungkin *Book Chapter* ini berada ditangan pembaca yang budiman. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada para penulis yang menyumbangkan pemikiran dan gagasannya dalam *Book Chapter* ini. Akhir kata,

semoga *Book Chapter* ini mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembedaan Pancasila di Indonesia. Salam Pancasila!!!

Denpasar, 15 Mei 2021

Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Dwijendra

I Gusti Ngurah Santika, S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xiv

**ANALISIS KRITIS TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 YANG
MENGHAPUSKAN PANCASILA DALAM MUATAN
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**

<i>I Gusti Ngurah Santika</i>	1
-------------------------------------	---

**PENGUATAN MODAL SOSIAL SUBAK DALAM
PELESTARIAN NILAI-NILAI PANCASILA**

<i>Gede Sedana</i>	22
--------------------------	----

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM
KONSEP TRI HITA KARANA**

<i>Made Sila</i>	43
------------------------	----

**AKTUALISASI NILAI PANCASILA DALAM
PERSPEKTIF TRI HITA KARANA PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

I Wayan Eka Santika 57

**URGENSI PANCASILA DALAM MENGHADAPI
GLOBALISASI**

I Gede Sujana 70

**KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER
HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

A.A. Istri Eka Krisna Yanti 93

**AKSIOLOGI PANCASILA DAN TANTANGANNYA DI
TENGAH DISRUPSI PEMBELAJARAN**

Dewa Made Dwicky Putra Nugraha 110

**MEMBANGUN KARAKTER GENERASI ALPHA
MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA
SEBAGAI SENJATA PAMUNGKAS KETAHANAN
NASIONAL**

I Putu Yoga Purandina 128

**MEWUJUDKAN KEBEBASAN PERS YANG
BERTANGGUNGJAWAB BERDASARKAN PANCASILA**

I Wayan Kotaniartha 145

**PENTINGNYA NILAI PANCASILA DALAM
KEBIJAKAN IMPOR BERAS**

Dicky Marsadi 161

**PENDIDIKAN KARAKTER DAN NILAI – NILAI
PANCASILA MELALUI CERITA RAKYAT PADA
ANAK USIA DINI**

I Putu Yudi Sudarmawan 172

**APLIKASI BELAJAR QUIZIZZ SEBAGAI AKTUALISASI
PANCASILA DALAM MEDIA PEMBELAJARAN BAGI
MAHASISWA DI MASA PANDEMI COVID-19**

Ni Wayan Swarniti 186

**TATA GUNA LAHAN DAN PENATAAN RUANG
YANG BERKEADILAN SPASIAL**

Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja 210

**PEMANFAATAN *GOOGLE CLASSROOM* UNTUK
MEMFASILITASI *SELF-REGULATED LEARNING*
DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Gede Sutrisna 228

PENGUATAN MODAL SOSIAL SUBAK DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI PANCASILA

Gede Sedana

Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra
gedesedana@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian memiliki peranan yang sangat penting di dalam pemangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Sektor pertanian berkembang dari sistem pertanian tradisional sampai pada pertanian modern. Pertanian tradisional sering dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan nilai sosial dari masyarakat petani saat itu. Hingga saat ini, sistem pertanian tradisional masih dilakukan oleh kelompok petani di berbagai negara terutama di negara agraris. Salah satu bagian dari system pertanian yang dikenal adalah sistem irigasi baik irigasi teknik maupun non-teknis. Secara umum, irigasi merupakan bentuk aplikasi pengelolaan air yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian di lahan sawah dan non-sawah, dimana para petani membuat dan membangun sistem sederhana (saat terdahulu) guna membendung air yang terdapat di tingkat sumber seperti sungai, mata air, jurang.

Pengelolaan irigasi pertanian merupakan suatu kegiatan dalam suatu sistem yang dikategorikan sebagai fenomena yang

kompleks (Wibisono, 2013). Sistem irigasi ini memiliki manfaat untuk kebutuhan sosial juga yang dicirikan dengan adanya integrasi internal dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal (Raversteijn dkk., 2011). Pengelolaan irigasi secara konvensional atau tradisional sering dipandang sebagai sistem yang kurang efisien. Namun, beberapa peneliti juga meyakini bahwa pengelolaan sistem irigasi tradisional memiliki keefektifan baik dari sisi teknis maupun non-teknis (Windia, 2006, Sedana, *et al* 2014; Roth and Sedana, 2015).

Di Indonesia, kelembagaan air irigasi berkembang dari kegiatan tradisi masyarakat setempat yaitu melalui kelembagaan irigasi. Eksistensi kelembagaan tersebut dipengaruhi oleh ciri geografis lokal, aktivitas produksi pertanian, dan intervensi pemerintah (Saptana, *et al* 2001). Salah satu sistem irigasi tradisional yang sangat dikenal di dunia adalah subak. Nilai-nilai tradisi yang telah diimplementasi oleh subak sejak ribuan tahun lalu juga menjadi salah satu inspirasi bagi pendiri negara Indonesia yang diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia, Pancasila menjadi acuan dan pedoman mengenai perilaku menjadi warga negara yang baik karena nilai-nilainya mengandung cara berfikir dan bertindak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Damanhuri *et al*, 2016; Eddy, 2018).

Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya adalah sebagai berikut: (i) pedoman hidup; (ii) perangkat tata nilai; (iii) jiwa bangsa; (iv) jati diri bangsa; (v) alat pemersatu bangsa; dan (vi) ketahanan bangsa (Krisnamurti *et al*, 2020). Perkembangan globalisasi, modernisasi dan dinamika masyarakat yang terjadi saat ini memberikan berbagai implikasi terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila pada berbagai kehidupan termasuk dalam sistem subak. Pengakuan badan dunia yaitu *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)* terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam

subak telah diformalkan sejak tahun 2012 melalui penetapan subak sebagai *world cultural heritage* atau Warisan Budaya Dunia (Lestari, *et al*, 2015; Windia dan Wiguna, 2013).

Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sistem subak yang telah terbentuk lebih dari 1.000 tahun yang lalu masih menunjukkan eksistensinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem subak merupakan modal sosial bagi lembaga subak di dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial, pertanian, keagamaan dan ekonomis. Modal sosial yang masih kuat pada sistem subak memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menemukenali modal sosial subak berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di dalam pembangunan pertanian, khususnya di lahan sawah.

II. PEMBAHASAN

2.1 Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Subak

Pada hakikatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya yang didasarkan pada Pancasila. Pembangunan sector pertanian sebagai integral dari pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Kondisi ini menjadi sangat rasional karena Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian dalam arti luas. Penyelenggaraan pembangunan pertanian tidak hanya berkenaan dengan aspek ekonomi tetapi juga menyangkut aspek teknis, sosial dan budaya, tradisi, keyakinan, dan keagamaan di dalam suatu kelembagaan pertanian.

Secara tegas, Pancasila dan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula halnya pada sektor pertanian, negara memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan para petani beserta keluarganya. Pemerintah dalam beberapa dekade terakhir telah melakukan berbagai kewajibannya di dalam membangun pertanian termasuk memberikan perlindungan kepada petani.

Salah satu kewajiban tersebut telah dituangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani. Perlindungan petani yang dimaksudkan adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan, pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani di dalam melaksanakan pengelolaan usahatani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

2.2 Sistem Subak dan Modal Sosial

Pertanian tanaman pangan adalah salah satu subsektor pada sektor pertanian yang masih memiliki peranan sangat penting di dalam pembangunan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Ketahanan pangan bagi negara menjadikan kondisi bangsa yang semakin kuat di dalam mendukung dan menciptakan ketahanan nasional. Para petani di Indonesia merupakan produsen pangan, khususnya padi dan palawija, dimana kondisi ekonominya masih relatif rendah karena adanya berbagai masalah dan tantangan baik secara internal maupun eksternal.

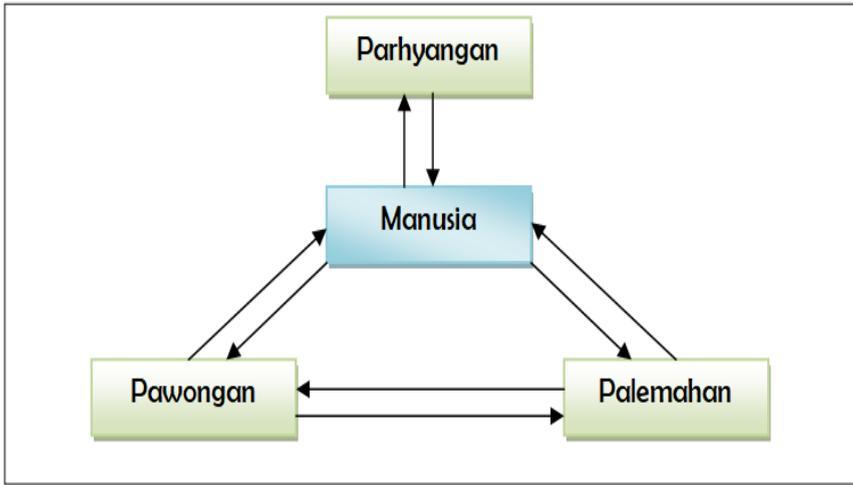
Pengelolaan pertanian tanaman pangan di Provinsi Bali telah dilakukan sejak dahulu melalui organisasi petani dengan sistem irigasi yang tradisional dan dikenal dengan sebutan subak. Menurut Perda Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 tentang Subak, subak didefinisikan sebagai suatu organisasi petani pengelola air irigasi yang bersifat sosio teknis religius, dalam suatu kawasan sawah tertentu, mendapatkan air irigasi dari suatu sumber tertentu, mengelola Pura Subak, dan bersifat otonom. Disebutkan pula bahwa lembaga subak sebagai bagian dari budaya Bali merupakan suatu organisasi sosial yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya yang mengelola pemanfaatan air irigasi untuk usahatani di lahan sawah. Oleh karena itu, subak perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya.

Subak-subak di Bali memiliki asas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, serta konsep Tri Hita Karana yang dijiwai oleh Agama Hindu. Beberapa tujuan subak yang diatur di dalam Perda Nomor 9 tahun 2012 adalah mencakup: (i) memelihara dan melestarikan organisasi subak; (ii) mensejahterakan kehidupan petani; (iii) mengatur pengairan dan tata tanaman; (iv) melindungi dan mengayomi petani; dan (v) memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

Sistem subak-subak di Bali memiliki filosofi Tri Hita Karana (THK) yang dijadikan landasan di dalam pengelolaan irigasi dan pertanian. Filosofi ini memberikan makna yang kuat terhadap keharmonisan, keseimbangan di dalam kebersamaan antara manusia, alam dan Yang Maha Kuasa (Tuhan). Perwujudan filosofi *THK (Tri Hita Karana)* yang terdiri dari *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* memiliki nilai-nilai universal tentang kehidupan yang menggambarkan pola-pola hubungan keharmonisan dan keseimbangan untuk mewujudkan tujuan

organisasinya (Windia, 2006; Suwarnata, 2011). Hubungan di antara ketiga komponen THK dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Komponen tri hita karana



Gambar 1 memberikan gambaran secara umum bahwa *Parhyangan* adalah hubungan yang harmonis antara manusia (petani) dengan Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa. Para petani senantiasa mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai rahmatNya yang telah diberikan dan akan diberikan dalam pengelolaan usahatannya. *Pawongan* merupakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesama, yaitu antar petani, petani dengan pengurus subak, dan petani dengan pihak luar termasuk pemerintah. Hubungan ini terjadi dalam bentuk interaksi sosial yang intensif dalam berbagai kegiatan yang berkenaan pertanian, irigasi, lingkungan dan ritual keagamaan. Sementara itu, *palemahan* diartikan sebagai suatu hubungan yang harmonis antara manusia (para

petani) dengan lingkungan alam sekitarnya. (Windia, *et al* 2015).

Sebagai organisasi irigasi tradisional, subak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (i) membantu pemerintah dalam meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan pertanian; (ii) melaksanakan aktivitas di dasarkan pada hukum adat dan adat istiadat dalam subak; (iii) menetapkan peraturan internal (*awig-awig*) sebagai suatu kesepakatan atau konsensus untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, irigasi dan pertanian; (iv) membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adatistiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan *paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka*; (v) menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan subak dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (vi) mengembangkan kemampuan *krama* subak untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan (vii) menjaga kelestarian wilayah subak dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan (Perda No.9/2012).

Nilai-nilai yang telah berkembang dalam organisasi subak merupakan komponen dari modal sosial yang memiliki manfaat untuk memperkuat eksistensi subak. Modal sosial yang dimaksud atau *social capital* mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan di masyarakat karena modal sosial merupakan energi kolektif suatu masyarakat yang bermanfaat untuk mengatasi persoalan bersama dan menjadi sumber motivasi di dalam pencapaian kemajuan ekonomi (Flassy, *et al.*, 2009). Modal sosial meliputi empat komponen yaitu *norms, reciprocity, trust, and network* yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pola perilaku kehidupan dan kerjasama antar warga masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan individu untuk

penyelenggaraan kerjasama secara kolektif. (Subejo, 2004; Mudarta, 2009). Selanjutnya, disebutkan juga bahwa *Social capital is the trust, reciprocity and mutuality that inhere to social relationships. It accumulates to the extent that members of different social groups can maintain respect for differences and learn to cooperate, especially beyond the family and clan. Trust and mutuality in the sociological sense are often identified as a "moral resource (Carrol, 2001).*

2.3 Nilai-nilai Pancasila pada Sistem Subak

Pancasila merupakan dasar negara yang sekaligus menjadi landasan, pedoman dan sekaligus mengontrol setiap pikiran, sikap, dan perilaku manusia dalam kehidupan (Octavian, 2018). Nilai-nilai Pancasila terlihat pada nilai-nilai yang diimplementasikan dalam aktivitas pertanian, termasuk di dalam kehidupan para petani di dalam sistem subak. Sesuai dengan sifatnya yang sosio-agraris-religius, subak-subak di Bali memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan di antara satu nilai dengan nilai lainnya saling berkaitan secara kuat. Seperti telah disebutkan di atas bahwa filosofi subak-subak yang sangat terkenal adalah Tri Hita Karana yang juga telah menjadi jiwa dari para petani anggotanya di dalam beraktivitas dalam bidang irigasi dan pertanian dan kegiatan pendukungnya.

2.3.1 Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ketuhanan yang mahaesa memberikan makna bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang sangat percaya dengan adanya Tuhan. Selain itu, Indonesia juga mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan serta menjadikannya pedoman paling esensial bagi setiap umatnya di dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam penyelenggaraan kegiatan pertanian dan irigasi pada lembaga sistem subak, nilai ketuhanan sangat kental bagi seluruh petani sebagai anggota subak.

Mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat terhadap Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa. Nilai ketuhanan ini terkandung pada komponen *Parhyangan* sebagai salah satu dari komponen THK.

Pengejawantahan nilai ketuhanan dalam sistem subak terlihat pada artefak di dalam setiap subak, di antaranya adalah bangunan pura atau tempat suci untuk pemujaan Tuhan. Keberadaan tempat suci untuk kegiatan irigasi dan pertanian berada pada level individu petani, level subak, level antar subak dan bahkan sampai ke tingkat provinsi. Pemilikan bangunan suci bahkan menjadi salah satu syarat terbentuknya subak. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila telah sejak lama dipahami dan diimplementasikan oleh para petani anggota subak hingga saat ini.

Pada level petani, setiap petani memiliki satu tempat suci kecil yang dibangun di bagian hulu dari lahan sawahnya atau tepatnya di saluran intake (*pengalapan*) ke petak sawahnya. Bentuk bangunannya bervariasi termasuk juga bahan yang digunakannya. Dimana tergantung pada kemampuan ekonomi dari setiap petani. Pada bangunan suci ini, setiap petani (juga istrinya) melakukan pemujaan dengan mempersembahkan sesaji (istilah lokalnya adalah *banten* atau *canang*) pada hari-hari tertentu sesuai dengan Kalender Bali dan sesuai dengan tahapan pengelolaan usahatani padi di lahan sawahnya. Para petani memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Tuhan melalui pengelolaan usahatannya yang produktif dan hasilnya memberikan keuntungan ekonomis. Hasil penelitian Windia, *et al* (2015) menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat 15 kali kegiatan ritual keagamaan yang dilakukan oleh petani sepanjang satu musim tanam tanaman padi.

Pada level subak, beberapa bangunan suci yang dimiliki oleh subak adalah Pura Bedugul, Pura Ulun Subak, Pura Ulun Suwi dan lain sebagainya, tergantung pada luasan areal subak dan

sistem budaya serta adat/tradisi yang telah ada sebelumnya. Pada bangunan-bangunan suci tersebut, penyelenggaraan ritual keagamaan dilakukan oleh para petani secara bersama-sama melalui koordinasi *pekaseh* (ketua subak). Berbagai rangkaian upacara keagamaan dilakukan di bangunan suci tersebut disebut sesuai dengan hari-hari baik pada tahapan pengelolaan usahatani padi dan juga odalan setiap enam bulan atau 210 hari (satu bulan Bali setara dengan 35 hari).

Pada level antar subak, beberapa bangunan suci yang menjadi pemujaan subak-subak dapat berada di tingkat kabupaten dan juga provinsi. Sejak ribuan tahun yang lalu, subak-subak di Bali menyelenggarakan kegiatan ritual keagamaan di Pura Ulun Danu, yaitu bangunan suci yang terdapat di kawasan danau. Di Bali terdapat empat danau, yaitu Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan dan Danau Batur. Ini berarti bahwa terdapat empat Pura Ulun Danu di Bali. Secara tradisi yang diturunkan, pada setiap Pura Ulun Danu telah menjadi tempat pemujaan bagi subak-subak yang merasa bahwa air irigasinya bersumber dari salah satu danau tersebut.

Pada Subak Tegalinggah dan Subak Pegayaman di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya keberagaman keyakinan atau agama para petani anggotanya, yaitu Agama Islam dan Hindu. Sehubungan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, subak telah mampu melakukan pembinaan kerukunan hidup di antara petani anggota subaknya yang memiliki agama dan kepercayaan berbeda. Mereka sangat meyakini bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya merupakan hak privat tentang hubungan pribadi antara dirinya dengan Tuhan Yang Mahaesa. Penyelenggaraan ritual keagamaan dilakukan secara terpisah pada bangunan suci yang berbeda pula. Ini berarti bahwa para petani yang berbeda agama dan kepercayaan telah menunjukkan sikap yang saling menghormati keyakinan

masing-masing di dalam menjalankan ibadahnya. Kekuatan nilai ketuhanan pada para petani menjadi salah satu modal sosial bagi subak untuk menjaga keutuhan organisasinya di dalam penyelenggaraan kegiatan pertanian dan irigasi.

2.3.2 Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki simbol rantai yang terdiri dari gelang-gelang kecil dan tersambung satu dengan yang lainnya secara utuh memberikan makna adanya hubungan yang sangat erat di antara sesama manusia. Pada sistem subak, hubungan antar petani telah diatur melalui peraturan internal atau awig-awig yang dibuat dan disusun berdasarkan pada kesepakatan dan konsensus seluruh anggota subak. Tidak perbedaan perlakuan yang signifikan terhadap seluruh anggota karena setiap anggota telah dibebankan kewajiban-kewajiban dan diberikan hak-haknya sesuai dengan kewajiban tersebut. Kewajiban yang dimiliki oleh anggota subak didasarkan pada alokasi air irigasi yang diterimanya. Hak dan kewajiban anggota subak diatur berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang sangat panjang, seperti berkenaan dengan luas lahan sawah, lokasi lahan sawah, sifat fisik tanah (berpasir, liat atau lempung) dan berbagai pertimbangan lainnya.

Pada sistem subak, nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban tidak didasarkan pada perbedaan agama atau keyakinan, asal anggota subak, kedudukannya di masyarakat. Namun, keanggotaan subak secara umum dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pada kesepakatan bersama. Ketiga kategori tersebut adalah anggota aktif, anggota pasif dan anggota kehormatan. Anggota aktif adalah petani yang setiap saat selalu mengikuti kegiatan persubakan, sedangkan mereka yang tidak aktif dan memberikan kompensasi atau kontribusi kepada subak tergolong anggota pasif. Anggota kehormatan biasanya diberikan kepada

petani yang memiliki jasa atau menjadi pemuka agama di dalam organisasi subak.

Organisasi subak melalui koordinasi pekaseh selalu mengutamakan rasa kebersamaan, saling menghargai, tenggang rasa di antara para petani anggota subak. Salah satu aktivitas yang menunjukkan kebersamaan dan tenggang rasa tersebut adalah pada system pinjam-meminjam air irigasi, terutama saat musim kemarau. Keterbatasan air irigasi dapat diatur melalui system rotasi dan juga staggering sehingga petani tidak mengalami kekurangan air irigasi dan mengakibatkan gagal panen. Ini berarti bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab telah ada dan diimplementasikan dalam kegiatan persubakan sejak lama hingga saat ini. Nilai kemanusiaan yang ditunjukkan pada subak-subak adalah bertahannya sifat tolong-menolong dan kegotongroyongannya. Sifat-sifat para petani tersebut merupakan modal sosial di dalam subak dan menjadikan interaksi antar petani semakin baik dan menjadi kekuatan bagi subak di dalam membangun dan mengembangkan pengelolaan usahatani di lahan sawahnya.

Ini berarti bahwa para petani anggota subak memiliki *mutual trust* atau saling percaya di antara mereka sehingga menjadi modal sosial yang memudahkan bagi pengurus subak dan pihak luar, seperti pemerintah dan lembaga lainnya untuk melakukan kegiatan bersama (Sedana, *et al* 2014). Kolaborasi dan kemitraan di antara subak dengan institusi pemerintah atau non-pemerintah berjalan dengan lancar sebagai efek dari kuatnya modal sosial subak. Misalnya implementasi program intensifikasi khusus pada usahatani padi telah berjalan secara baik, yaitu peningkatan produktivitas tanaman dan lahan.

2.3.3 Nilai Persatuan Indonesia

Sila ketiga dilambangkan dengan simbol pohon beringin yang memiliki makna nilai kesatuan dan persatuan harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Perbedaan di antara warga negara tidak menjadi hambatan atau masalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Selain itu, sila ini juga mengandung makna nasionalisme. Pada sistem subak, nilai persatuan ini yang ditunjukkan adalah adanya saling membantu (tolong-menolong) dan bergotong royong di antara para petani untuk menjamin kebersamaan dan persatuan di dalam berorganisasi. Berdasarkan pada awig-awig yang telah disepakati, para petani di dalam organisasi subak telah menunjukkan adanya interaksi sosial yang sangat akomodatif dan adaptif. Awig-awig subak merupakan bagian dari modal sosial subak yang memiliki fungsi untuk mengatur segala aktivitas pertanian dan irigasi di dalam sistem subak. Kekuatan awig-awig sebagai modal social disebabkan karena didalamnya mengatur segala sesuatu yang wajib dilakukan dan yang dilarang termasuk dengan penerapan sanksinya jika terjadi pelanggaran.

Pada setiap subak di Bali, para petani memiliki semangat gotong-royong yang masih tinggi dalam melakukan kegiatan-kegiatan persubakan. Kegiatan gotong royong yang sering dijumpai adalah pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi. Petani anggota subak memiliki tingkat respon yang tinggi jika terjadi kerusakan saluran irigasi dan bangunan irigasi, sehingga mereka segera melakukan perbaikan secara gotong royong. Bentuk gotong royong dalam system subak adalah kontribusi tenaga kerja, material dan atau uang tunai. Pada kegiatan ritual keagamaan di tingkat subak juga memerlukan kegotongroyongan para petani termasuk wanita tani (istri petani). Perlu dicatat bahwa salah satu alat pemersatu organisasi subak adalah kegiatan ritual keagamaan dan bangunan suci yang dimilikinya. fisik dan kegiatan ritual subak. Ritual subak

merupakan unsur pemersatu para anggotanya sehingga subak menjadi organisasi yang kuat dan tangguh.

2.3.4 Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

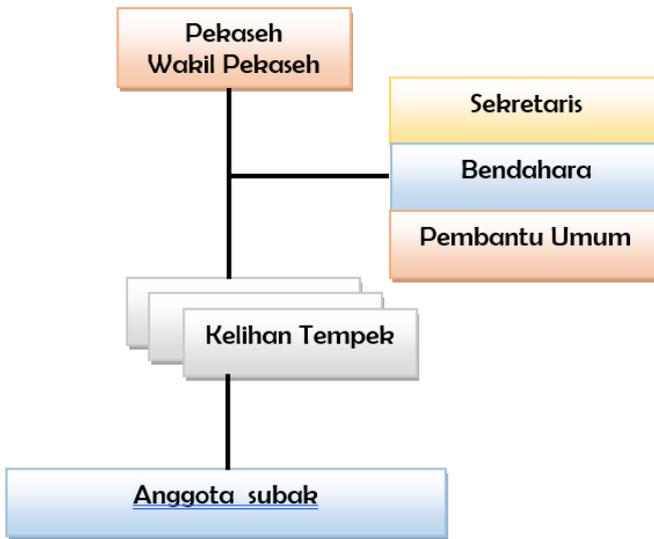
Sila ke-4 ini memiliki makna bahwa pemerintahan yang diselenggarakan di Indonesia memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, sila ini juga memberikan arti secara eksplisit adanya musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagai suatu cara pengambilan keputusan. Atau dengan kata lain, paham demokrasi menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengambil keputusan dalam rangka pencapaian tujuan.

Pada tingkat subak, pengambilan keputusan selalu dilakukan secara musyawarah mufakat dari seluruh anggotanya. Prinsip mendasar yang digunakan di dalam pengambilan keputusan adalah konsensus anggota subak. Sistem perwakilan juga dilakukan pada subak jika jumlah anggota subak adalah relatif besar karena ukuran areal sawahnyanya juga relatif luas. Subak-subak yang memiliki luas dan anggota besar biasanya dibagi menjadi beberapa sub-subak yang disebut dengan istilah *tempek*, *banjaran* atau *lanyahan*. Struktur organisasi subak secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada masing-masing *tempek* diketuai oleh *kelihan* *tempek* dan bertanggung jawab kepada *kelihan* subak atau *pekaseh*. Berkenaan dengan sistem perwakilan, *kelihan* *tempek* menjadi perwakilan anggota *tempeknnya* di dalam pertemuan-pertemuan tertentu. Beberapa pengambilan keputusan yang telah ditetapkan melalui musyawarah mufakat dalam subak-subak di antaranya adalah: (i) pola tanam; (ii) distribusi dan alokasi air irigasi; (iii) jadwal tanam; (iv) pilihan varietas padi; dan (v) penyelenggaraan ritual keagamaan. Proses dan cara pengambilan keputusan yang

sangat sederhana dalam lembaga subak merupakan bagian dari modal sosial yang kuat di dalam menjamin kelanggengan organisasi melalui penciptaan suasana yang damai, kondusif bagi para petani anggota.

Gambar 2
Struktur organisasi subak



Pada kegiatan ekonomi di tingkat subak juga dilakukan melalui kesepakatan anggota subak. Misalnya, dalam pembentukan koperasi tani seperti di Subak Guama, kegiatan simpan-pinjam, penggunaan dana-dana bantuan, penentuan kontribusi atau iuran para anggota dan aktivitas bisnis lainnya (Sedana, 2020). Kondisi ini memberikan indikasi bahwa modal sosial subak memberikan dukungan yang kuat untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan ekonomis di tingkat subak, dan memberikan manfaat bagi para anggotanya. Oleh karena itu, nilai-nilai modal sosial di tingkat subak sejalan dengan makna yang terkandung dalam sila keempat

Pancasila. Beberapa nilai tersebut adalah (i) tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain karena mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan; (iii) menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah; dan (v) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

2.3.5 Nilai Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila memiliki makna sebagai dasar dan juga tujuan yaitu terwujudnya kondisi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Pada hakekatnya, keadilan merupakan suatu nilai yang sangat mendasar bagi warga masyarakat Indonesia. Beberapa hal yang terkait dengan nilai keadilan sosial ini adalah: (i) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan; (ii) mengembangkan sikap adil terhadap sesama; (iii) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (iv) menghormati hak orang lain; dan (v) suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain (Raditya, 2020).

Nilai-nilai keadilan yang telah dilakukan pada organisasi subak di Bali adalah distribusi dan alokasi air irigasi. Subak memiliki Teknik atau cara tradisional di dalam menentukan alokasi air irigasi, yaitu menggunakan sistem *tektek*, *nyari*, *depuk* dan sebutan lainnya. Cara tradisional ini diterapkan melalui pengalaman subak yang telah teruji dan dirasakan sangat adil oleh para petani anggotanya. Sistem *tektek/depuk* tidak harus memberikan alokasi air irigasi dalam jumlah yang sama untuk petani yang memiliki luas sawah sama. Artinya bahwa jika Petani A memiliki luas sama dengan Petani B belum tentu mereka

memiliki hak sama terhadap alokasi air irigasinya. Nilai keadilan di subak didasarkan pada lokasi sawah, sifat tanah, kewajiban atau *ayahan* sebelumnya selain luas areal sawah. Dengan cara tradisional ini para petani merasakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam berbagai aktivitas persubakan. Penerapan nilai-nilai keadilan di tingkat subak bertujuan untuk mewujudkan tercapainya peningkatan produktivitas lahan dan tanaman, perbaikan kualitas produk guna memberikan peningkatan pendapatan bagi para petani.

Sistem *tektek/depuk/nyari* yang diterapkan pada subak-subak berkenaan dengan alokasi air irigasi tidak terlepas dari kewajiban yang dibebankan kepada para petani. Semakin besar kewajiban yang dibebankan, maka semakin tinggi juga hak yang diperoleh oleh para petani. Bagi subak, sistem alokasi air ini menjadi modal sosial untuk menjamin ketersediaan air irigasi di setiap musim (hujan dan kemarau) sehingga pengelolaan usahatani dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil sebelum musim tanam.

III. PENUTUP

Subak merupakan salah satu sistem irigasi tradisional yang sangat dikenal di dunia dan bahkan telah dijadikan warisan budaya dunia. Nilai-nilai tradisi subak sebagai modal social telah ada dan dilaksanakan sejak ribuan tahun lalu dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi acuan dan pedoman berperilaku menjadi warga negara. Tri Hita Karana sebagai filosofi subak telah menjadikan para petani anggota subak masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisinya dan juga nilai-nilai Pancasila di dalam kegiatan persubakan, seperti irigasi dan pertanian.

Modal sosial subak memiliki peranan yang sangat penting di dalam membangun pertanian dan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilandasi oleh keseimbangan, keharmonisan pola interaksi di antara ketiga elemen tri hita karena, yaitu *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila telah menjadi pedoman bagi petani anggota subak di dalam beraktivitas seiring dengan pelestarian nilai-nilai modal sosial subak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashrama, B.2005. Implementasi Konsep Tri Hita Karana pada Beberapa Hotel di Bali, Tesis program MM-Unud, Denpasar.
- Carrol, TF. 2001. *Social Capital, Local Capacity Building, and Poverty Reduction*. Michigan: Michigan University Press.
- Damanhuri, Wika Hardika L., Febrian Alwan B. , Ikman Nur Rahman. 2016. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Studi Kasus di Kampung Pancasila Desa Tanjung Sari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. *Untirta Civic Education Journal, Vol. 1, No. 2*; 185-198.
- Eddy, I W.T. 2018. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Dharmasmrti*, 1:116-123.
- Flassy, DJ.,Sasli R., Agus S. 2009. *Modal Sosial: Unsur-Unsur Pembentuk*. <http://p2dtk.bappenas.go.id>.
- Krisnamukti, B.P., Dhamayanti, K.G.H., Maharani, Y. dan Putri, S.A. 2020. Implementasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Di Malang. *Jurnal Rontal Keilmuan PKN. Vol.9. No. 1*: 66-72.
- Lestari, P.F.K., W. Windia, dan Astiti, N.W.S. 2015. Penerapan Tri Hita Karana untuk Keberlanjutan Sistem Subak yang

- Menjadi Warisan Budaya Dunia: Kasus Subak Wangaya Betan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan *Jurnal Manajemen Agribisnis* Vol. 3, No. 1: 22-33.
- Mudarta, K.G. 2009. Jaringan Sosial (*Networks*) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 27, No.1, Juli 2009.
- Octavian, W.A.. 2018. Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan NilaiNilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 5, Nomor 2: 123-128.
- Raditya, I.N. 2020. Isi Butir-Butir Pengamalan Pancasila Lengkap Sila 1 Sampai 5. <https://tirto.id/f5Mw> Isi Butir-Butir Pengamalan Pancasila Lengkap Sila 1 Sampai 5 - Tirto.ID,
- Ravesteijn. W. dkk. 2011. “*River system in transition: pathway and stakeholder involvement*”, dalam C. A. Brebbia (ed) *River Basin Management VI, WIT transactions on ecology and the environment*, Volume 146: 327-338. United Kingdom: Witpress
- Roth, D. and Sedana, G. 2015. *Reframing Tri Hita Karana: From ‘Balinese Culture’ to Politics. The Asia Pacific Journal of Anthropology* Vol.16, Issue 2: 157-175.
- Saptana, Hendiarto, Sunarsih, dan Sumaryanto. 2001. Tinjauan Historis dan Perspektif Pengembangan Kelembagaan Irigasi Di Era Otonomi Daerah, *FAE. Volume 19, No. 2: 50 – 65*
- Sedana, G. I G.A.A.Ambarawati, and W. Windia. 2014. *Strengthening Social Capital for Agricultural Development: Lessons from Guama, Bali, Indonesia. Asian Journal of Agriculture and Development. Vol.11 No.2:39-50*

- Sedana, G. 2017. Menghentikan *kepunahan subak* di Bali: Pengembangan Agribisnis Berbasis *Subak*. Yogyakarta: Pustaka Larasan.
- Sedana, G. and I N.D. Astawa. 2017. *Revitalization of Farmers Organization Functions Towards Agribusiness for Its Sustainability: Ideas for Traditional Irrigation Organization in Bali Province, Indonesia. International Journal of Development Research Vol. 7, Issue 11: 17258-17262*
- Sedana, G. 2020. Pengembangan Koperasi Subak: Kasus Subak Guama di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism, Vol. 9, No. 3: 394-403.*
- Sedana, G. and A. Rahmat. 2020. *Alternatives Policies to Strengthen the Traditional Irrigation System for Supporting the Food Security Program: Case of the Subaks' System in Bali, Indonesia. International Journal of Advanced Science and Technology 29 (7s), 973-984.*
- Subejo. 2004. Peranan *Social Capital* Dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar Studi *Social Capital* di Pedesaan Indonesia. *Majalah Agro Ekonomi Vol. 11.No.1.*
- Suwarnata, A.A.E.2011.Keberlanjutan Sistem Subak di Perkotaan Kasus Subak Anggabaya di Kawasan Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Tesis.Program Studi Agribisnis,Pasca Sarjana UNUD.Denpasar
- Wibisono, S.C. 2013. Irigasi Tirtayasa : Teknik Pengelolaan Air Kesultanan Banten Pada Abad Ke-17 M. *AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 31 No. 1: 1-80.*
- Windia, W.2006.*Transformasi Sistem Irigasi Subak yang Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana.* Denpasar : Pustaka Bali Post.

- Windia,W. dan W.A.A.Wiguna, W.A.A. 2013. *Subak Warisan Budaya Dunia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Windia, W., Sumiyati, dan G. Sedana. 2015. Aspek Ritual pada Sistem Irigasi Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. *Jurnal Kajian Bali, Vol.5, No.1*: 23-56.